

ANALISIS PERILAKU PEMILIH RASIONAL PADA PILKADA KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

Jimmy Rungkat

Politeknik Amamapare, Timika (jimmyrungkat@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to analyze rational voter behavior in the 2024 Regional Head Election in Mimika Regency, Indonesia, focusing on voter participation, trust in election organizers, money politics, and knowledge of candidates' visions and missions. A quantitative approach with a descriptive survey design was employed. Data were collected from 399 respondents selected through proportionate stratified sampling from 140,765 registered voters in Mimika Baru and Wania Districts. Structured questionnaires were administered one month before the election, and the data were analyzed using descriptive statistics. The findings show that 89% of respondents intended to vote, while 63.2% did not trust the electoral process to be conducted fairly and honestly. Furthermore, 56.6% were willing to accept money in exchange for voting for a particular candidate. Voters also showed limited knowledge of candidates' visions and missions, with 65.7% unfamiliar with those of regent and deputy regent candidates and 84.5% unfamiliar with those of governor and deputy governor candidates. These findings indicate that voter rationality in Mimika is constrained by short-term material considerations, social obligations, and limited political information. Thus, high voter participation does not necessarily reflect substantive rational voter behavior based on informed choices and long-term interests.

Keywords: *rational voter behavior, voter participation, local election, Mimika Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pemilih rasional pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mimika Tahun 2024, dengan berfokus pada keinginan menggunakan hak pilih, kepercayaan terhadap penyelenggara, sikap terhadap praktik politik uang, serta pengetahuan dan pemahaman pemilih terhadap visi dan misi pasangan calon. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-survei. Populasi penelitian adalah masyarakat yang terdaftar dalam DPT di Distrik Mimika Baru dan Distrik Wania sebanyak 140.765 jiwa. Sampel berjumlah 399 responden yang ditentukan menggunakan Rumus Slovin dengan margin of error 5% dan tingkat kepercayaan 95%, serta pengambilan sampel secara proporsional berstrata berdasarkan kelurahan, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur satu bulan sebelum pelaksanaan Pilkada dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 89% responden menyatakan akan menggunakan hak pilih, tetapi 63,2% tidak percaya penyelenggaraan Pilkada akan berlangsung jujur dan adil. Sebanyak 56,6% responden mengaku bersedia menerima uang untuk memilih pasangan calon tertentu. Selain itu, 65,7% tidak mengetahui visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan 84,5% tidak mengetahui visi dan misi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kabupaten Mimika memperlihatkan pola rasionalitas yang terdistorsi, karena keputusan memilih tidak sepenuhnya didasarkan pada informasi yang memadai, evaluasi program, dan kepentingan jangka panjang, tetapi juga dipengaruhi kewajiban sosial, keuntungan materi jangka pendek, serta keterbatasan pengetahuan terhadap program kandidat. Dengan demikian, tingginya partisipasi pemilih belum sepenuhnya mencerminkan perilaku pemilih rasional dalam pengertian substantif.

Kata Kunci: perilaku pemilih rasional, partisipasi pemilih, pilkada, Kabupaten Mimika

PENDAHULUAN

Pasca reformasi 1998, sistem pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam sistem demokrasi di Indonesia berubah total, dari pemilihan tidak langsung atau pemilihan melalui perwakilan suara masyarakat di lembaga legislatif menjadi pemilihan langsung oleh masyarakat,

baik untuk anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun Kepala Daerah.

Jika pada sistem pemilihan tidak langsung atau dikenal dengan sistem Pemilu proporsional tertutup, masyarakat mewakilkan suaranya kepada partai politik, maka pada pemilihan langsung, masyarakat diberikan kewenangan untuk memilih secara langsung.

Secara khusus untuk pemilihan Kepala Daerah dalam konteks otonomi daerah pasca reformasi, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di pasal 24 ayat 5 disebutkan "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan."

Berdasarkan penelitian yang dilakukan CSIS tentang Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024 (Fernandes et.al, 2025:7) ditemukan tiga kecenderungan utama, yakni: Pertama, hasil pilkada 2024 menunjukkan belum terjadinya sirkulasi dan pergeseran elite secara bertahap di tingkat lokal. Kandidat dan kepala daerah yang terpilih pada pilkada serentak nasional 2024 sebagian besar berasal dari elite lama dan sebagian besar calon gubernur (80,6 persen) serta calon wakil gubernur (67,9 persen) yang berusia 50-69 tahun. Hal ini berimplikasi pada tersumbatnya regenerasi kepemimpinan nasional yang berasal dari tingkat lokal. Kedua, terkait dengan status incumbency yang belum tentu dapat memengaruhi keterpilihan seorang kepala daerah. Laporan ini menunjukkan, dari 37 provinsi, terdapat 21 gubernur inkumben yang kembali maju. Dari jumlah itu, 9 di antaranya menang dan 12 lainnya mengalami kekalahan. Dan ketiga, terjadi perubahan dominasi dan kepemimpinan politik di tingkat lokal, yang ditunjukkan dengan besarnya proporsi gubernur terpilih yang berasal dari Partai Gerindra dibandingkan dengan partai lain.

Dalam konteks ini, partisipasi politik masyarakat menjadi faktor yang sangat penting. Dimana partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan hak suaranya untuk memilih (*voting behavior*) sangat diperlukan demi suksesnya keberlangsungan pesta demokrasi dan untuk memetakan dukungan politik mayoritas masyarakat secara khusus terhadap Kepala Daerah yang nantinya terpilih. Seperti yang dikatakan Hafidz (dalam Rungkat et.al, 2023:2), ketika partisipasi politik masyarakat begitu tinggi, maka dengan sendirinya akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, legitimasi dan kualitas layanan publik yang efektif, serta mencegah gerakan pembangkangan publik dalam perjalanan suatu pemerintahan.

Demokrasi langsung menempatkan pemilih sebagai aktor sentral, kualitas pemerintahan

yang lahir sangat bergantung pada kualitas keputusan yang diambil oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam kerangka teori, pemilih rasional merupakan pemilih yang kritis dan independen sikap politiknya, dimana rasionalitas itu disesuaikan dengan kondisi dan isu yang berkembang saat itu, sehingga ekspresi pemilih rasional ini selalu dinamis (Jati, 2022:82).

Teori tentang perilaku pemilih rasional (*rational choice*) yang digagas oleh Anthony Downs (seperti dikutip Putri dan Ridwan, 2026:140) merupakan konsep yang menyatakan bahwa pemilih dalam mengambil keputusan politik individualnya dengan mempertimbangkan biaya, manfaat, dan hasil yang diharapkan. Pertimbangan rasional pemilih ini melihat partisipasi politiknya tersebut memiliki nilai yang cukup untuk membenarkan keterlibatannya.

Selain melihat untung-ruginya, pemilih rasional juga menekankan pada tindakan yang diambil secara rasional ketika membuat pilihan untuk pergi ke tempat pemungutan suara (Kristian dan Yamardi, 2024:14), proses pemilihan sebagai hasil dari perhitungan matang tentang manfaat dan kerugian yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Ardiansyah, et.al, 2024:400), serta memilih berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap visi-misi, kualitas dan kompetensi kandidat (Ubaid dan Subandi, 2022:3). Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan Muhtadi (2018:71), bahwa pemilih rasional melihat betapa pentingnya program atau isu-isu teknokratik yang disampaikan kandidat sebagai dasar untuk menjatuhkan pilihannya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemaknaan terhadap pemilih rasional hingga saat ini menunjuk pada empat indikator utama, yakni bertindak rasional untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tingkat kepercayaan secara rasional terhadap proses pemilihan melalui penyelenggara, sikap rasional terkait transaksional politik saat menentukan pilihan, serta pengetahuan dan pemahaman atas visi-misi kandidat.

Penelitian yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa keputusan memilih sering kali dipengaruhi oleh perpaduan pertimbangan ekonomi, ikatan kekerabatan, kepercayaan terhadap tokoh, hingga tekanan lingkungan sosial. Di

daerah dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang khas seperti Kabupaten Mimika, tantangan tersebut terasa semakin kompleks. Kehadiran dinamika kepentingan yang beragam, kesenjangan pembangunan yang mencolok, serta tatanan masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan kesukuan, menjadikan perilaku pemilih di daerah ini layak dikaji secara mendalam.

Salah satu hal yang menjadi perhatian mendasar adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk datang menggunakan hak suaranya selaras dengan keyakinan bahwa proses pemilihan berlangsung jujur dan adil. Kehadiran pemilih di TPS pada dasarnya merupakan manifestasi kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Ketika masyarakat meragukan kemandirian dan kejujuran penyelenggara, seharusnya minat untuk ikut berpartisipasi ikut menurun.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah ketahanan pemilih terhadap praktik pertukaran keuntungan materi. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi yang masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, tawaran pemberian uang atau barang dari pasangan calon dapat menjadi godaan yang berat untuk ditolak.

Selanjutnya, kualitas pilihan politik sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap apa yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Pemilih yang mengetahui secara jelas visi, misi, dan program kerja calon dapat membandingkan tawaran tersebut dengan kepentingan daerahnya, sehingga pilihannya menjadi cerdas dan bermanfaat. Sebaliknya, ketika pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan masih rendah, pilihan politik cenderung didasarkan pada pertimbangan di luar program kerja, seperti kesamaan asal daerah, kedekatan personal, atau pengaruh pihak lain. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama jika rendahnya pemahaman tidak hanya terjadi pada satu atau dua kelompok masyarakat, melainkan menyebar secara luas. Hal ini berpotensi melahirkan pemimpin yang populer namun tidak memiliki arah kebijakan yang jelas, sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan secara optimal ke dalam pemerintahan.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan gambaran penting mencakup keempat aspek tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan Ansar S., et.al (2025:421) terhadap partisipasi pemilih di Papua Pegunungan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, menemukan bahwa partisipasi pemilih tumbuh ketika masyarakat meyakini pemilihan memberikan dampak nyata bagi kehidupan mereka. Kepercayaan terhadap penyelenggara terbukti menjadi penggerak utama keinginan untuk ikut memilih.

Kemudian, penelitian yang dilakukan Istianah, et.al (2025:50-51) terhadap perilaku pemilih pada Pilkada Kota Sukabumi tahun 2024, dengan menggunakan pendekatan *mixed method* (kuantitatif dan kualitatif), menemukan bahwa partisipasi pemilih dipengaruhi oleh komersialisasi politik yang mereduksi nilai substantif demokrasi. Partisipasi politik masyarakat tidak dipandang sebagai bentuk ekspresi politik normatif, melainkan sebagai pertukaran sosial yang bersifat kalkulatif. Pemilu dalam kondisi ini lebih menyerupai pasar, di mana suara dipertukarkan dengan imbalan, dan kandidat berlomba bukan menawarkan visi, melainkan paket bantuan.

Penelitian yang dilakukan Yasin dan Kadji (2024:258) terhadap perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2024, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei, menemukan bahwa politik uang bukan sekadar strategi elektoral, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika politik lokal yang diterima oleh sebagian besar masyarakat. Faktor ekonomi memainkan peran kunci dalam memperkuat praktik ini, di mana keterbatasan sumber daya dan ketimpangan sosial mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap insentif finansial dalam proses pemilihan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Umarella, et.al (2026:23577) terhadap rasionalitas pemilih dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode SEM-PLS, menemukan bahwa perilaku memilih masyarakat lebih banyak didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap visi-misi calon Kepala Daerah dibandingkan pada perhitungan biaya partisipasi politik. Visi-misi calon Kepala Daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi faktor paling dominan dalam membentuk keputusan memilih. Pemilih cenderung memberikan dukungan

kepada kandidat yang dinilai mampu menghadirkan manfaat nyata melalui program pembangunan, peningkatan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dari paparan berbagai penelitian di atas, tampak jelas bahwa belum ada kajian yang secara khusus mencakup keempat aspek perilaku pemilih rasional. Termasuk belum ada pula penelitian yang secara khusus membahas perilaku pemilih terhadap Pilkada di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku pemilih rasional pada Pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-survei, bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mimika tahun 2024. Tujuan utama desain penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan keadaan atau fenomena sesuai situasi sebenarnya, tanpa bermaksud menguji hubungan kausalitas atau pengaruh antar variabel (Waruwu, et.al, 2025:924-925). Rancangan ini dilakukan untuk memperoleh data sikap, pengetahuan, dan perilaku pemilih di wilayah kajian.

Warga masyarakat Kabupaten Mimika yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat Pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2024 berdasarkan data KPU Kabupaten Mimika (2024) adalah 224.514 jiwa. Namun populasi dalam penelitian ini difokuskan kepada warga di Distrik Mimika Baru dengan jumlah DPT sebanyak 99.293 jiwa dan Distrik Wania dengan jumlah DPT sebanyak 41.472 jiwa, sehingga total keseluruhan sebagai populasi penelitian menjadi 140.765 jiwa. Dua distrik ini diambil sebagai populasi karena jumlah DPT yang paling banyak dengan keberagaman latar belakang demografi warganya mewakili semua warga di distrik lainnya di Kabupaten Mimika. Penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin dengan Margin of Error (MoE) sebesar 5% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga jumlah responden adalah 399 orang.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = ukuran sampel
 N = ukuran populasi
 e = margin of error (tingkat kesalahan)

Langkah Perhitungan:

1. Hitung nilai e^2
 $e^2 = (0,05)^2 = 0,0025$
2. Masukkan ke rumus Slovin
$$n = \frac{140.765}{1 + 140.765(0,0025)}$$
3. Hitung penyebut
 $1 + 140.765(0,0025) = 1 + 351,9125 = 352,9125$
4. Hitung nilai n
$$n = \frac{140.765}{352,9125} = 398,73$$

Jumlah Sampel (n):
≈ 399 responden

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara proporsional berstrata menurut sebaran kelurahan domisili, jenis kelamin, kelompok usia, dan tingkat pendidikan, agar setiap lapisan masyarakat terwakili secara memadai (Sugiyono, 2013:82).

Data dikumpulkan satu bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Mimika 2024 menggunakan kuesioner terstruktur berisi pernyataan dan pertanyaan tertutup terkait niat kehadiran mencoblos pada Pilkada 27 November 2024, kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pilkada, potensi penerimaan uang untuk memilih pasangan calon, pengetahuan terhadap Visi-Misi Paslon Bupati-Wakil Bupati, dan pengetahuan terhadap Visi-Misi Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Papua Tengah. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif meliputi distribusi frekuensi dan persentase.

$$P_i = \frac{f_i}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_i = persentase kategori ke-i
 f_i = frekuensi kategori ke-i
 n = jumlah responden ($n = 399$)

Statistics

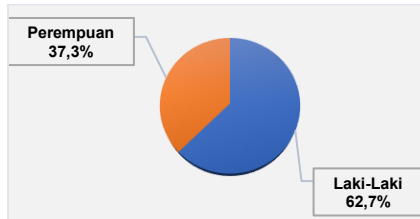
	Jenis Kelamin	Agama	Kelompok Usia	Pendidikan terakhir	Kelurahan Domisili	Apakah anda akan mencoblos saat Pilkada Mimika pada 27 November 2024?	Apakah anda percaya bahwa penyelenggara Pilkada akan berlaku jujur dan adil saat Pilkada nanti?	Apakah anda akan menerima uang yang diberikan agar memilih Paslon tertentu?	Apakah anda mengetahui Visi dan Misi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika?	Apakah anda mengetahui Visi dan Misi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah?
N	Valid	399	399	399	399	399	399	399	399	399
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		1.37	1.89	1.97	3.86	5.80	1.15	1.63	1.43	3.27
Std. Error of Mean		.024	.040	.039	.041	.161	.023	.024	.025	.054
Median		1.00	2.00	2.00	4.00	5.00	1.00	2.00	1.00	5.00
Mode		1	2	4	4	1	2	1	4	5
Std. Deviation		.484	.465	.776	.818	3.209	.464	.483	.496	1.034
Sum		548	753	786	1540	2313	460	651	572	1813

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

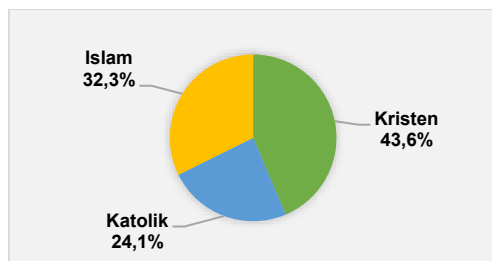
1. Profil Responden

Sebaran responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 62,7% dan perempuan 37,3%.



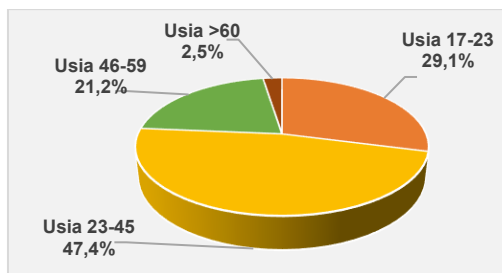
Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

Secara agama, Kristen 43,6%, Katolik 24,1%, serta Islam 32,3%.



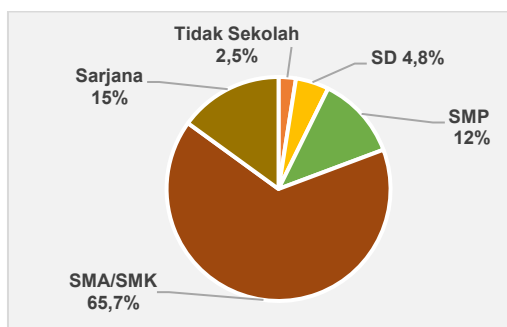
Grafik 2. Agama Responden

Kelompok usia terbanyak adalah 24-45 tahun sebanyak 47,4%, diikuti 17-23 tahun 29,1%, 46-59 tahun 21,1%, dan 60 tahun ke atas 2,5%.



Grafik 3. Usia Responden

Tingkat pendidikan terakhir didominasi lulusan SMA/SMK 65,7%, Sarjana (S1) 15%, SMP 12%, SD 4,8%, dan tidak sekolah 2,5%.

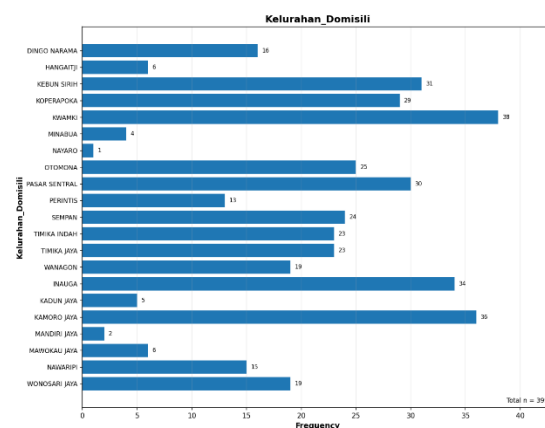


Grafik 4. Pendidikan Responden

Responden tersebar di 21 kelurahan di Kabupaten Mimika, 14 kelurahan di Distrik Mimika Baru dan 7 kelurahan di Distrik Wania. Jumlah responden terbanyak berasal dari Kelurahan Kwamki sebesar 9,5%, disusul Kamoro Jaya 9,0%, Inauga 8,5%, Kebun Sirih 7,8%, Pasar Sentral 7,5%, Koperapoka 7,3%, Otomona 6,3%, Sempan serta Timika Indah dan Timika Jaya masing-masing 5,8% hingga 6,0%, Wanagon dan Wonosari Jaya masing-masing 4,8%, Dingo Narama 4%, Nawaipi 3,8%, Perintis 3,3%, sedangkan kelurahan lainnya memiliki persentase di bawah 2% yaitu Hangaitji dan Mawokau Jaya masing-masing 1,5%, Kadun Jaya 1,3%, Minabua 1%, Mandiri Jaya 0,5%, dan Nayaro paling kecil yaitu 0,3%.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid DINGO NARAMA	16	4.0	4.0	4.0
HANGAITJI	6	1.5	1.5	5.5
KEBUN SIRIH	31	7.8	7.8	13.3
KOPERAPOKA	29	7.3	7.3	20.6
KWAMKI	38	9.5	9.5	30.1
MINABUA	4	1.0	1.0	31.1
NAYARO	1	0.3	0.3	31.3
OTOMONA	25	6.3	6.3	37.6
PASAR SENTRAL	30	7.5	7.5	45.1
PERINTIS	13	3.3	3.3	48.4
SEMPAN	24	6.0	6.0	54.4
TIMIKA INDAH	23	5.8	5.8	60.2
TIMIKA JAYA	23	5.8	5.8	65.9
WANAGON	19	4.8	4.8	70.7
INAUGA	34	8.5	8.5	79.2
KADUN JAYA	5	1.3	1.3	80.5
KAMORO JAYA	36	9.0	9.0	89.5
MANDIRI JAYA	2	0.5	0.5	90.0
MAWOKAU JAYA	6	1.5	1.5	91.5
NAWAPIPI	15	3.8	3.8	95.2
WONOSARI JAYA	19	4.8	4.8	100.0
Total	399	100.0	100.0	

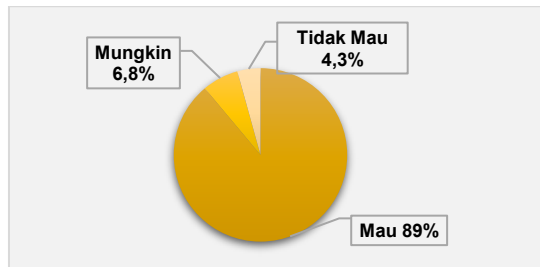
Tabel 1. Domisili Responden



Grafik 5. Domisili Responden

2. Keinginan Menggunakan Hak Pilih: 9 dari 10 Responden Mau Hadir di TPS

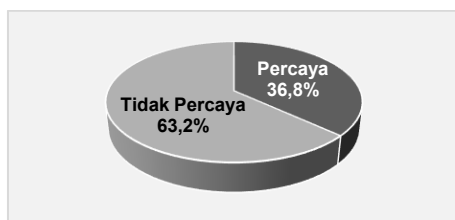
Sebanyak 89% menyatakan pasti akan mencoblos, 6,8% menyatakan mungkin, dan 4,3% menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya.



Grafik 6. Keinginan Menggunakan Hak Pilih

3. Kepercayaan Terhadap Penyelenggara: 6 dari 10 Responden Tidak Percaya Proses Bersih

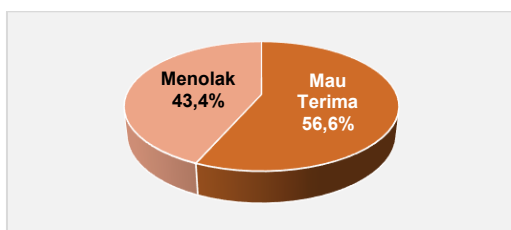
Hanya 36,8% yang mempercayai penyelenggara akan bekerja jujur dan adil. Sebaliknya, 63,2% menyatakan tidak percaya.



Grafik 7. Tingkat Kepercayaan Kepala Penyelenggara

4. Money Politics: Lebih dari Setengah Mau Terima Uang

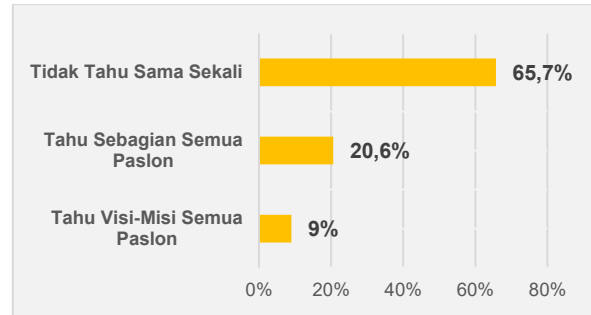
Sebanyak 56,6% menyatakan bersedia menerima uang yang diberikan agar memilih pasangan calon tertentu, sedangkan 43,4% menolak.



Grafik 8. Money Politics

5. Tingkat Pengetahuan Visi-Misi Paslon Bupati-Wakil Bupati: 2 Dari 3 Tidak Tahu Sama Sekali

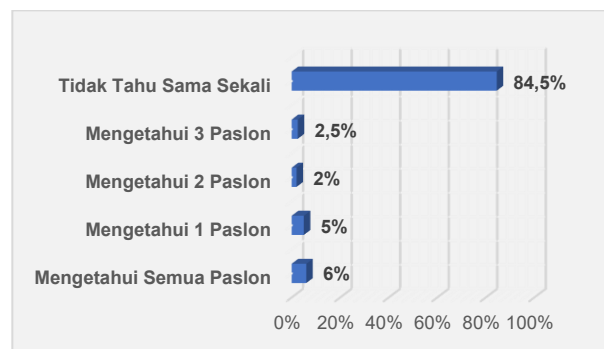
Terkait Visi-Misi dan Program Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, 9% mengetahui seluruh pasangan calon, 20,6% mengetahui sebagian, dan 65,7% tidak mengetahui sama sekali.



Grafik 9. Tingkat Pengetahuan Visi-Misi Paslon Bupati-Wakil Bupati

6. Tingkat Pengetahuan Visi-Misi Paslon Gubernur-Wakil Gubernur: 8 Dari 10 Tidak Tahu Sama Sekali

Pada tingkat Provinsi Papua Tengah, 6% mengetahui Visi-Misi dan Program seluruh Paslon, 5% mengetahui satu Paslon, 2% mengetahui dua Paslon, 2,5% mengetahui tiga Paslon, dan 84,5% tidak mengetahui sama sekali.

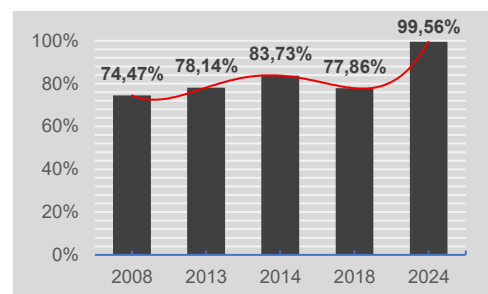


Grafik 10. Tingkat Pengetahuan Visi-Misi Paslon Gubernur-Wakil Gubernur

Pembahasan

1. Partisipasi Tinggi di Tengah Keraguan Institusional

Niat kehadiran mencapai 89% pada Pilkada Mimika 2024 ini seolah menunjukkan bahwa demokrasi di Mimika masih hidup dan dihargai warganya. Hal ini tampak pula pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Mimika tahun 2008, 2013 dan 2014 (2 putaran), 2018, dan 2024.



Grafik 11. Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Mimika (Data diolah Penulis)

Hasil tersebut menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan dibanding partisipasi masyarakat Mimika pada Pemilu 2024, dimana berdasarkan data KPU RI (2024:141) menempatkan Kabupaten Mimika pada kategori involvement (posisi terendah) dengan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) pada skor 43,72.

Namun jika ditelaah lebih dalam, kehadiran fisik semata belum tentu mencerminkan kesadaran politik yang matang. Dalam teori perilaku pemilih rasional, seseorang memutuskan berpartisipasi apabila manfaat yang diharapkan, baik berupa perubahan kebijakan maupun kepuasan moral memenuhi kewajiban warga negara, melebihi biaya waktu, tenaga, dan pengorbanan yang dikeluarkan.

Tingginya niat untuk hadir ini ternyata tidak berbanding lurus dengan kepercayaan pada penyelenggaraan Pilkada Mimika 2024, sebab hampir dua pertiga masyarakat tidak percaya pada penyelenggara. Tomutu, et.al (2025:5) mengungkapkan bahwa partisipasi yang didorong semata-mata oleh kewajiban tanpa disertai kepercayaan pada kualitas proses cenderung bersifat simbolik, pasif dan mudah dimanipulasi, karena pemilih tidak melakukan pengawasan kritis terhadap yang terjadi selama Pilkada berlangsung.

Sementara itu, masih adanya 11,1% responden yang ragu atau menolak berpartisipasi pada Pilkada Mimika Tahun 2024 juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Penarikan diri dari proses Pilkada, dapat pula merupakan bentuk rasionalitas itu sendiri, yaitu ketika pemilih menilai bahwa pengaruh suaranya terlalu kecil untuk mengubah hasil, atau ketika ia memandang seluruh proses tidak akan berjalan jujur.

Keraguan ini bisa menjadi sinyal awal bahwa sebagian warga mulai meragukan apakah pemilihan ini benar-benar akan menghasilkan perubahan yang berarti bagi kehidupan mereka. Jika keraguan ini dibiarkan tanpa penjelasan dan kepastian yang nyata, maka angka kehadiran yang tinggi di atas kertas dapat menyembunyikan kekecewaan yang dalam yang suatu saat meledak menjadi ketidakpedulian massal atau ketidakstabilan politik.

2. Erosi Kepercayaan Terhadap Penyelenggara

Mayoritas responden (63,2%) tidak percaya penyelenggara Pilkada Mimika 2024

akan berlaku jujur dan adil. Angka ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan krisis kepercayaan yang nyata.

Kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara adalah fondasi paling dasar dari seluruh bangunan demokrasi (Sari, 2026:90). Sebab integritas penyelenggara menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya integritas Pemilu atau Pilkada. Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2016) (dalam Hayckel, et.al, 2024:100), bahwa setiap lembaga penyelenggara pemilu harus dapat menjamin legitimasi dan kredibilitas proses pemilu yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilakukan jika lembaga penyelenggara pemilu menerapkan prinsip-prinsip fundamental, yaitu independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berorientasi pelayanan. Prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar bagi penyelenggaraan pemilu dan sangat esensial untuk menjamin integritas prosesnya.

Jika fondasi ini retak, maka apa pun yang dibangun di atasnya, akan senantiasa dipertanyakan keabsahannya. Pemilih yang rasional tidak dapat mengambil keputusan yang baik jika sejak awal ia yakin bahwa prosesnya tidak akan berjalan adil. Dia cenderung berhenti mengevaluasi calon berdasarkan program dan rekam jejak, lalu beralih mencari kepastian lain yang lebih dapat diandalkan, termasuk menerima iming-iming materi, berpihak pada kelompok yang dianggap paling kuat, atau bahkan menarik diri sepenuhnya dari partisipasi.

Ketika kepercayaan terhadap penyelenggara Pilkada turun di bawah ambang batas kritis, masyarakat tidak sekadar meragukan hasilnya, tapi mereka mulai memandang seluruh proses politik sebagai pertunjukan yang naskahnya sudah ditulis oleh pihak lain. Jika keyakinan ini mengakar, legitimasi pemimpin yang terpilih nanti akan dipertanyakan sejak hari pertama menjabat, sehingga program pemerintahan sulit berjalan efektif, karena rakyat tidak akan mematuhi dengan sukarela (Dharmawan, et.al, 2025:54).

Pemulihan kepercayaan atas penyelenggara ini tidak dapat dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan keterbukaan informasi yang rinci, keterlibatan tokoh masyarakat dan adat dalam pengawasan, serta penanganan tegas

terhadap setiap dugaan pelanggaran. Jika penyelenggara dapat membuktikan bahwa proses berjalan jujur, adil, dan transparan, maka angka 36,8% kepercayaan warga akan tumbuh menjadi kekuatan yang mengukuhkan persatuan. Namun jika sebaliknya, keraguan yang sudah ada akan mengeras menjadi kepastian bahwa demokrasi di Mimika tidak berpihak pada rakyat. Saat itulah kerusakan pada sistem akan sangat sulit diperbaiki.

3. Politik Uang (Money Politics) yang Dinormalisasi

Fakta bahwa lebih dari separuh warga (56,6%) terbuka terhadap tawaran materi ini bukan sekadar berita buruk bagi demokrasi, ini adalah bukti bahwa logika keuntungan sesaat telah mengalahkan pertimbangan kepentingan jangka panjang di benak mayoritas pemilih. Dan angka mayoritas ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sudah menjadi bagian dari transaksi sosial yang dianggap normal dan wajar.

Orientasi memilih masyarakat berubah menjadi pragmatis, dimana mereka tidak merasa disuap melainkan merasa "berhak menerima bagian" dari calon yang akan memimpin, sebuah pola pikir yang mengubah hubungan pemilih dan calon dari hubungan pengawasan menjadi hubungan pemberian bantuan sesaat. Logika yang tampak masuk akal secara individu ini justru menghancurkan kesejahteraan secara kolektif. Setiap suara yang diberikan demi keuntungan sesaat adalah suara yang menyerahkan nasib daerah kepada siapa yang paling mampu membeli, bukan yang paling mampu memimpin.

Dari sudut pandang teori perilaku pemilih rasional, fenomena ini dipahami sebagai hubungan antara teori pilihan rasional dengan teori *economic supply and demand*, yaitu hubungan antar pemilih dengan yang dipilih seperti hubungan antara para calon pembeli (pemilih) dan penjual (kandidat) dalam kerangka interaksi yang menekankan pada kalkulasi untung-rugi. *Utility maximation* atau keuntungan maksimal dalam teori ini menjadi dasar dari rasionalitas seorang pemilih. Berdasarkan konsep *economic man* menjelaskan bahwa pemilih dapat dikatakan rasional apabila dalam pengetahuannya dapat menggunakan sumber daya yang terbatas demi output yang bernilai (Asmuni dan Kosandi, 2020:73).

Namun Tindakan politik uang ini seakan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, pemilih menerima uang karena merasa tidak ada yang berubah, pemimpin membeli suara karena itulah cara yang terbukti efektif, dan keduanya saling memperkuat keteringgalan daerah dari kemajuan yang seharusnya diraih (Adityawan, 2025:2830). Praktik politik uang merusak partisipasi pemilih dengan menciptakan ketimpangan dalam proses pemilihan, di mana pemilih yang menerima uang atau imbalan lainnya cenderung tidak memilih berdasarkan pertimbangan rasional, tetapi lebih pada keuntungan pribadi (Ramadhani, Andina Aulia, et.al, 2025:83).

Rasionalitas jangka pendek ini justru menghasilkan kerugian jangka panjang secara kolektif. Pemimpin yang terpilih berutang pada pendana, bukan pada rakyat. Kebijakan yang diambil akan melindungi kepentingan kelompok yang menyumbang, bukan kepentingan publik yang luas.

Memutus kecenderungan ini tidak bisa hanya dengan seruan moral atau ancaman hukum semata, ia menuntut perbaikan kesejahteraan yang nyata, pengawasan ketat terhadap aliran dana kampanye, serta kesadaran yang tumbuh dari bawah, bahwa suara yang dijual hari ini adalah masa depan yang diserahkan begitu saja. Angka 43,4% warga yang menolak tegas adalah harapan yang harus diperkuat dan diperbanyak. Jika persentase penolakan ini dapat ditingkatkan, maka rasionalitas demokrasi akan kembali ke jalurnya, yaitu ketika pemilih memilih pemimpin yang mampu membawa daerah ke arah kemajuan, bukan yang hanya mampu memberikan keuntungan sesaat.

4. Pemilih yang Tidak Mengetahui Siapa yang Dipilih

Sebanyak 65,7% responden tidak mengetahui visi dan misi Paslon Bupati-Wakil Bupati, bahkan 84,5% tidak mengetahui visi dan misi Paslon Gubernur-Wakil Gubernur, bukan sekadar kurangnya minat, melainkan indikator kegagalan sistem sosialisasi sekaligus lemahnya akses informasi yang setara.

Rendahnya tingkat pemahaman ini bukan kesalahan warga semata, ini adalah kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang berwenang. Sosialisasi yang dangkal, penyebaran informasi yang tidak merata, serta

keterbatasan akses terhadap penjelasan yang mudah dipahami membuat warga berada dalam kegelapan informasi, sehingga menciptakan rasionalitas terbatas.

Pengetahuan politik adalah prasyarat mutlak perilaku pemilih yang rasional. Ketika mayoritas warga tidak mengetahui yang diusulkan oleh mereka yang meminta suara, maka keputusan akan bergeser ke faktor-faktor yang lebih mudah dijangkau namun jauh lebih dangkal: kekerabatan, tokoh yang paling dikenal wajahnya, atau siapa yang paling banyak terlihat di tengah masyarakat.

Siklus ini memperkuat ketidakberdayaan masyarakat, tidak dapat memilih berdasarkan program, tidak dapat mengawasi berdasarkan janji, dan tidak dapat menuntut pertanggungjawaban berdasarkan hasil. Demokrasi tanpa informasi yang merata ibarat perjalanan tanpa peta, siapa pun bisa naik ke kemudi, tetapi tidak ada yang tahu ke mana mobil ini sebenarnya melaju.

Dalam konsep demokrasi deliberatif, menekankan bahwa partisipasi warga negara dalam proses politik harus bersifat inklusif, berbasis pada argumentasi rasional, serta didukung oleh akses terhadap informasi yang memadai (Putri, 2025:6).

Memperbaiki kondisi ini adalah tugas paling mendesak bagi seluruh pemangku kepentingan. Keterlambatan pengetahuan politik ini tidak boleh dibiarkan berlanjut ke pemilihan-pemilihan berikutnya. KPU, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan media harus bekerja bersama-sama menyebarkan informasi yang lengkap, menyeluruh di semua wilayah, jujur, dan mudah dipahami kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketika warga terinformasi dengan baik, barulah demokrasi bekerja sebagaimana mestinya, bukan sekadar pesta suara, melainkan pilihan cerdas untuk masa depan yang lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Mimika tahun 2024 memperlihatkan pola rasionalitas yang terdistorsi. Pemilih tetap berniat hadir di TPS karena menimbang bahwa manfaat kewajiban sosial lebih besar daripada biaya kehadiran, meskipun mereka tidak mempercayai keadilan proses penyelenggaraan. Sebagian besar bersedia menerima imbalan materi karena secara perhitungan individu, keuntungan yang nyata

saat ini dinilai lebih pasti dibandingkan manfaat pemerintahan yang baik di masa depan yang sifatnya belum terlihat. Demikian pula, rendahnya pemahaman terhadap visi dan misi calon membuat pemilih tidak memiliki dasar informasi yang lengkap untuk membandingkan program, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada kedekatan atau pemberian sesaat. Semua ini tampak rasional bagi masing-masing individu, namun sebenarnya bukan pilihan rasional yang sesungguhnya, yakni keputusan berdasarkan informasi memadai demi kepentingan jangka Panjang, melainkan keputusan yang secara kolektif merugikan masa depan daerah.

Saran/Rekomendasi

KPU dan Bawaslu Kabupaten Mimika wajib menjamin transparansi penuh di setiap tahapan dan menindak tegas praktik politik uang tanpa pandang bulu, sementara para pasangan calon harus menyampaikan program kerja secara langsung dan jujur ke seluruh lapisan masyarakat tanpa pemberian materi apa pun. Tokoh adat, agama, dan seluruh warga diharapkan menyadari bahwa suara adalah hak luhur yang tidak boleh ditukar, sehingga setiap pilihan lahir dari kesadaran jernih, bebas pengaruh, dan bertujuan mencetak kepemimpinan yang mampu membawa kemajuan nyata bagi Kabupaten Mimika.

REFERENSI

- Adityawan, Riandhika. (2025). Politik Uang; di Balik Potensi dalam Strategi Kampanye dan Efektivitas Mobilisasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak. *Journal of Comprehensive Science*, 4(10), 2828-2836.
- Ansar S., et.al. (2025). Manajemen Strategis dalam Proses Pemilu: Meningkatkan Kepercayaan dan Partisipasi Pemilih di Papua Pegunungan – Studi Kasus Peran Komisioner KPU. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 11(2), 415-425.
- Ardiansyah, Muhammad Rici Nur, et.al. (2024). Analisis Voting Behavior Gen-Z pada Pemilu 2024 dan Pengaruh Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045: Studi Kasus Mahasiswa Kota Surabaya. *Jurnal AJSH*, 4(2), 390-408.
- Asmuni, Mukhamad Busro dan Kosandi, Meidi. (2020). Faktor Politik Uang dalam

- Perilaku Memilih Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018. *Indonesian Governance Journal*, 3(2), 71-85.
- Dharmawan, Rifky Alif, et.al. (2025). Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya). *Jurnal Dialektika*, 5(1), 52-68.
- Fernandes, Arya, et.al. (2025). *Kepala Daerah Terpilih 2025: Kepemimpinan Politik di Tingkat Lokal dan Tantangan untuk Generasi Elite Baru*. Jakarta: Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS.
- Hayckel, Edralin et.al. (2024). Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 99-109.
- Istianah, Ratna, et.al. (2025). Perilaku Pemilih dan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 41-53.
- Jadi, Wasisto Raharjo. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 70-84.
- Komisi Pemilihan Umum RI. (2024). *Indeks partisipasi pemilu pada pemilihan umum tahun 2024*. Jakarta: KPU RI. <https://siparmas.kpu.go.id/SiparmasFILE/DokumenBahanAjar/Dokumen-Bahan-Ajar-2502WIB145041.pdf>
- Kristian, Indra dan Yamardi. (2024). Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Presiden dan Legislatif 2024 di Kota Cimahi. *Jurnal Jipolis*, 1(3), 11-17.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2018). Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional. *Jurnal MAARIF*, 13(2), 68-86.
- Putri, Dhiyah Akmal dan Ridwan. (2026). Selective Democratic Engagement and Voter Participation in the 2024 Elections: Evidence from Palu City, Indonesia. *Jurnal Temali*, 9(1), 139-150.
- Putri, Rizky Amalia. (2025). Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda? *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 1-15.
- Ramadhani, Andina Aulia, et.al. (2025). Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(1), 76-85.
- Rungkat, Jimmy, et.al. (2023). Partisipasi Politik Warga Kampung Mawokauw Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika Pada Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, 2(1), 1-7.
- Sari, Ratih Padan. (2026). Etika sebagai Fondasi Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkepercayaan. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 87-99.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tomutu, Gafar, et.al. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024: Studi di Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. *Indonesian Journal of Public Administration and Policy*, 1(1), 1-13.
- Ubaid, Ahmad Hasan dan Subandi, H.B. Habibi. (2022). Perilaku Memilih Dalam Masyarakat Multikultur: Studi Kasus Pemilihan Walikota Medan 2020. *Jurnal Wacana Politik*, 7(1), 57-71.
- Umarella, Ismael Saleh, et.al. (2026). Rasionalitas Memilih dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara: Analisis Pertimbangan Biaya dan Manfaat Politik. *Jurnal RIGGS*, 5(2), 23569-23579.
- Waruwu, Marinu, et.al. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917-932.
- Yasin, Hendra dan Kadji, Jurisman. (2024). Politik Uang dalam Pilkada 2024 Kabupaten Jayapura: Antara Legitimasi Sosial dan Perilaku Memilih. *Jurnal Politica*, 11(2), 249-261.